

Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM Kelurahan Sumur Pacing Kota Tangerang

Amanda^{1*}, Fyola Salsabila², Muhammad Rafly Ramadhan³, Jesyca Say⁴, Rizky Awallia Putri⁵, Tia Fauziah⁶

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang,
Indonesia

*Corresponding author, email: amandashinta4@gmail.com

Diterima: 15 November 2025, Direvisi: 20 Desember 2025, Terbit: 22 Desember 2025

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in driving local economic growth, including in Sumur Pacing Subdistrict, Tangerang City. This study aims to analyze the role of the subdistrict government in developing MSME potential and to identify the challenges that arise during its implementation. The research employs a descriptive qualitative method through in-depth interviews and document analysis to gain a comprehensive understanding of the MSME conditions in the area. The findings reveal a discrepancy between the subdistrict government's claims and the experiences of MSME actors. Although the government states that it has provided various programs such as training sessions, MSME data collection, halal certification facilitation, and marketing support through bazaars or subdistrict events, many MSME actors report that they did not receive information or equal opportunities to participate. Some empowerment programs were even more heavily directed toward subdistrict cadres rather than active business owners, creating an impression of exclusivity and a lack of inclusive communication. These findings are analyzed using Government Role Theory and Local Empowerment Communication Theory, both of which emphasize the importance of two-way communication, information transparency, and community involvement in every stage of program implementation. Information gaps and low participation emerge as major obstacles to achieving sustainable MSME development. Therefore, this study highlights the need for improved communication strategies, more accurate data collection mechanisms, and stronger collaboration among the government, MSME actors, and other stakeholders so that empowerment programs can become more relevant, inclusive, and impactful for local economic growth.

Keywords: MSMEs; local empowerment; government role; community involvement; subdistrict.

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk di Kelurahan Sumur Pacing, Kota Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah kelurahan dalam mengembangkan potensi UMKM serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam proses implementasinya. Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan meliputi kegiatan pendampingan, diskusi langsung, dan pengumpulan informasi melalui komunikasi dengan pelaku UMKM serta perangkat Kelurahan, kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Sumur Pacing, Kecamatan Karawaci, Kota

Tangerang, dengan sasaran pelaku UMKM aktif di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim pemerintah kelurahan dengan pengalaman para pelaku UMKM. Meskipun pemerintah mengaku telah menyediakan berbagai program seperti pelatihan, pendataan UMKM, fasilitasi sertifikasi halal, serta dukungan pemasaran melalui bazar atau kegiatan kelurahan, banyak pelaku UMKM menyatakan tidak menerima informasi maupun kesempatan berpartisipasi secara merata. Beberapa program pemberdayaan bahkan lebih dominan melibatkan kader kelurahan dibanding pelaku usaha aktif, sehingga menimbulkan kesan eksklusivitas dan kurangnya komunikasi inklusif. Temuan ini dianalisis menggunakan Teori Peran Pemerintah dan Teori Komunikasi Pemberdayaan Lokal, yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah, transparansi informasi, dan libatkan masyarakat dalam setiap tahap program. Kesenjangan informasi dan rendahnya partisipasi menjadi hambatan utama dalam upaya pengembangan UMKM yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya perbaikan dalam strategi komunikasi, mekanisme pendataan, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan pihak terkait lainnya agar program pemberdayaan menjadi lebih relevan, inklusif, dan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Kata-kata kunci: UMKM; pemberdayaan lokal; peran pemerintah; libatkan masyarakat; kelurahan.

PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan upaya penerapan konsep manajemen pada perusahaan kecil dengan tenaga kerja dan perputaran keuangan yang terbatas (Sarjana et al., 2022) UMKM menjadi tulang punggung yang mendorong pembangunan industri sehingga memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Raja et al., 2023). UMKM sangat berdampak untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut data Kementerian UMKM per Desember 2024, terdapat 65,5 juta unit usaha mikro kecil di Indonesia atau setara dengan 99,9% dari total usaha yang ada. Jumlah usaha besar sekitar 5550 unit usaha atau 0,01%. UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional, dengan nilai mencapai Rp9.300 triliun (Aprilia et al., 2025).

UMKM biasanya berfokus pada hal-hal terkait kebutuhan rumah tangga (Putra, 2024). Walaupun pertumbuhan UMKM mengalami peningkatan, tetapi masih ada permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan UMKM tersebut. Permasalahan yang terjadi seperti kurangnya peran pemerintah dalam mengembangkan potensi umkm yang ada. Pemerintah perlu memberikan bantuan kepada UMKM agar mampu mempertahankan diri dalam kondisi pasar yang tidak stabil (Putri Salsabila

Indrawan Lubis, 2024). Pemerintah perlu memfasilitasi secara prioritas kepada usaha mikro kecil dan menengah, dalam bentuk program pelatihan dan pengembangan keterampilan serta memiliki fasilitas yang diberikan kepada pelaku UMKM (Artika, 2024). Oleh karena itu, pemerintah perlu memahami cara untuk mempertimbangkan dan mengembangkan kebijakan bagi kemajuan UMKM (Budi Dharma, Rukiana Hasibuan, 2022).

Dalam suatu Negara, pemerintah memiliki peran yang begitu penting. Secara umum pemerintah mempunyai peran untuk meminimalisir imbas dari kegagalan pemasaran supaya stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin dengan baik sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan (Hamzah et al., 2021). UMKM berpotensi sebagai pelopor untuk mencapai pilar ekonomi dengan inovasi bisnis, penciptaan lapangan kerja, mitigasi dampak negatif ekonomi, pe

Menciptakan kondisi kerja yang layak dan mengintegrasikan adaptasi sosial serta lingkungan ke dalam operasi bisnis merupakan prasyarat fundamental untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini membutuhkan dukungan dan kolaborasi multipihak dari berbagai sektor. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai tolok ukur yang menerangkan perkembangan perekonomian suatu wilayah atau negara dalam kurun waktu satu tahun, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, memastikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan, menjadi kunci untuk mencapai pembangunan jangka panjang (Wahyuni, 2020).

Penerapan pertumbuhan yang inklusif ini sangat relevan pada konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang berperan vital dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan. Dalam konteks implementasi kebijakan lokal, Pemerintah Kota Tangerang sangat mendukung perkembangan UMKM dengan berbagai kebijakan dan program yang ditujukan untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha kecil. Beberapa kebijakan tersebut termasuk kemudahan perizinan usaha, bantuan modal, pelatihan keterampilan, serta promosi produk-produk lokal melalui berbagai pameran dan event. Program-program seperti pelatihan kewirausahaan dan pendampingan bisnis sangat penting bagi para pelaku UMKM agar bisa mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya program ini,

banyak pengusaha kecil yang bisa meningkatkan kualitas produk, mengakses pasar yang lebih luas, dan mendapatkan pengetahuan tentang manajemen keuangan yang baik (HiTangerang.com, 2025).

Masalah pengabdian yang diangkat adalah belum maksimalnya pengetahuan, wawasan dan kemampuan para pelaku UMKM di Kelurahan Sumur Pacing untuk mengenalkan UMKM melalui pemasaran digital ke masyarakat yang lebih luas. Kegiatan pengabdian terdahulu yang sejenis diantaranya kegiatan pengabdian yang dilakukan Haryadi Mujianto, mengenai Pemasaran produk kopi Guntur di Desa Dano melalui komunikasi digital di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, hasil kegiatan menunjukkan bahwa dukungan peran pemerintah diperlukan untuk mempertahankan dan mensejahterakan para petani kopi agar tetap berkembang bahkan lebih besar, karena hal ini dapat berdampak bagi Desa Dano untuk menjadi Desa yang produktif (Mujianto, 2022).

Di Kelurahan Sumur Pacing, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, potensi UMKM sebenarnya cukup besar, baik dari sisi jumlah pelaku usaha maupun keragaman produk yang dihasilkan. Selama ini, aktivitas promosi dan penjualan produk UMKM cenderung bersifat insidental, seperti melalui bazar atau pasar murah yang hanya berlangsung saat ada acara kecamatan atau kegiatan tertentu. Pola ini belum cukup untuk memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku UMKM karena bersifat sementara dan terbatas (Mayantri, 2024). Oleh karena itu, program yang telah terpola tersebut menjadi fenomena yang menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal keberlangsungan usaha, visibilitas produk, dan daya saing pelaku UMKM di pasar yang lebih luas. Menyadari hal ini, pemerintah kelurahan mulai merancang strategi konkret dengan menyediakan pelatihan, pemberdayaan UMKM, dan penyediaan fasilitas berupa halaman kelurahan yang dapat digunakan UMKM untuk berjualan.

Namun demikian, sebagai program yang masih dalam tahap awal, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Pemerintah kelurahan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari dinas terkait, lembaga pelatihan, hingga keterlibatan masyarakat itu sendiri. Selain itu, perencanaan dan pelaksanaan program juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas pelaku UMKM setempat. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dilakukan agar dapat mengkaji lebih dalam mengenai peran pemerintah Kelurahan Sumur Pacing dalam

merintis pengembangan UMKM lokal, khususnya dalam memfasilitasi perkembangan UMKM yang berkelanjutan. Dengan memahami upaya dan tantangan yang ada, diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi masukan bagi penguatan kebijakan dan implementasi program pengembangan UMKM di tingkat kelurahan tersebut. Pengabdian sejenis yang relevan telah dilakukan oleh (Hayati & Kebonsari, 2022) yang mengkaji peran Pemerintah Kelurahan Kebonsari Surabaya dalam pemberdayaan UMKM. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan memiliki peran strategis sebagai fasilitator, katalisator, dan regulator dalam mendukung perkembangan UMKM. Peran fasilitator diwujudkan melalui penyediaan sarana prasarana, pendampingan, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak eksternal. Sementara itu, peran katalisator tampak dari respons cepat kelurahan terhadap keluhan pelaku UMKM dan penyelenggaraan pendampingan perizinan usaha. Adapun peran regulator dilakukan melalui implementasi kebijakan dan peraturan daerah terkait pemberdayaan UMKM guna menjamin kepastian hukum dan meningkatkan daya saing usaha mikro. Temuan ini memperkuat pentingnya keterlibatan aktif pemerintah kelurahan dalam merintis dan mengembangkan UMKM lokal secara berkelanjutan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait peran pemerintah Kelurahan Sumur Pacing di Kota Tangerang dalam mengembangkan UMKM yang ada. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah Kelurahan Sumur Pacing dalam mendukung keberlangsungan pertumbuhan UMKM, serta memahami tantangan yang dihadapi dalam pengembangan potensi UMKM di Kelurahan Sumur Pacing.

BAHAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kelurahan Sumur Pacing, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang dengan pelaku UMKM sebagai peserta sebanyak 13 orang. Adapun kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahap, diantaranya:

Tabel 1. Jenis Kegiatan dan Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Tahap	Jenis Kegiatan	Waktu	Metode
Tahap 1	Survei ke lokasi kegiatan di kelurahan sumur pacing yang melibatkan	23 April 2025	Survei dilakukan melalui pendekatan observasi langsung dan komunikasi

	kelompok pengabdian tujuannya untuk mengetahui kondisi sasaran yang akan dituju sekaligus mengajukan permohonan untuk melakukan kegiatan pengabdian.		awal dengan pihak kelurahan.
Tahap 2	Penyuluhan optimalisasi media sosial bagi UMKM	25 April 2025	Penyuluhan dilakukan kepada para pelaku UMKM aktif di Kelurahan Sumur Pacing dengan metode interaktif berupa penyampaian materi yang menarik, sesi tanya jawab dan praktik.
Tahap 3	FGD dengan pihak pemerintah Kelurahan Sumur Pacing dan pelaku UMKM	14 Mei 2025	Tahap ini berupaya melihat sejauh mana peran pemerintah Kelurahan Sumur Pacing terhadap para pelaku UMKM, hal ini bertujuan untuk mengetahui serta melihat ada tidaknya progres pemerintah Kelurahan Sumur Pacing dalam pengembangan UMKM.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui studi literatur. Penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk menjelaskan penelitian yang ada tanpa memberikan manipulasi data variabel diteliti dengan melakukan wawancara langsung (Bahri, 2017). Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode yang data dalam penelitiannya diperoleh dari data-data yang berupa dokumen, lisan, atau tulisan yang berasal dari informan dan dapat dipercaya kebenarannya. Sesuai dengan tujuannya, penelitian kualitatif beranjak pada konsep untuk mengupas mengenai permasalahan atas suatu fenomena sosial (Creswell, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang

mendalam mengenai peran pemerintah Kelurahan Sumur Pacing dalam pengembangan UMKM lokal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini merupakan teknik observasi berupa wawancara, dimana peneliti melakukan pengamatan dengan mewawancarai informan secara langsung. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka dengan pihak yang diwawancarai, diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya (Prof. Dr. Sugiyono., 2016). Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data menggunakan data yang sudah ada. Dokumen dapat berupa teks, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen bermanfaat untuk memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai permasalahan penelitian. Studi dokumentasi menjadi penunjang informasi dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam sebuah penelitian kualitatif (Prof. Dr. Sugiyono., 2016).

Tahap pengkodean terbuka yaitu proses analisis data lapangan yang dilakukan melalui tahap kegiatan, yaitu memilih konsep dan mengelompokan data dan konsep di atas dasar kesamaan fenomena untuk membuat kategori-kategori, menghubungkan antar kategori dengan memberikan karakteristik dari kategori, yaitu *properties* misalnya intensitas, sifat, frekuensi (Rijali, 2018), berikutnya hasil yang diperoleh dalam pengkodean terbuka ini adalah fenomena dan kategori (Karuntu, M. M., Saerang, D. P. E., & Maramis, 2022). Kategorisasi adalah berbagai aspek yang menjadi fokus pengamatan, meliputi sumber dan pemicu terjadinya perubahan sosial, faktor penyebabnya bentuknya, dan dampaknya (Yusa et al., 2024).

Tahap pengkodean terpusat yaitu kegiatannya dikembangkan pada saat penelitian berlangsung, yang berpacu pada kegiatan memetakan data berdasarkan hasil koding terbuka (Oktaria et al., 2023). Kategori fenomena yang diungkap akan dihubungkan satu sama lain, meliputi kondisi penyebab, fenomena itu sendiri, konteks, kondisi mengintervensi, aksi-interaksi dan konsekuensi (Mohajan & Mohajan, 2023). Secara visual langkah pengkodean terpusat dapat digambarkan melalui motif (kondisi, penyebab), gejala (fenomena), dan konteks (segala keadaan, suasana yang melingkupi 4 kondisi aksi - interaksi konsekuensi (Khoiri, 2018).

Tahap pengkodean terpilih adalah tahap kegiatan analisis data yang mengacu dalam proses strukturisasi dan sistematisasi, dan penentuan ulang dalam kegiatan story-line, yang merupakan kelanjutan dari tahap pengkodean terpusat (Corbin, 2020). Kegiatannya diikuti dengan penciptaan conditional maytrix yang mengacu kepada kemungkinan penambahan, pengurangan dan pengubahan pernyataan atau suatu fakta, berdasarkan perbedaan konteks, kondisi, ciri tindakan sosial, implikasi dan kemungkinan perbedaan perspektifnya (María-José Sosa-Díaz, 2022). Setelah data diperiksa, langkah selanjutnya menyusun kategori inti yang secara sistematis berkaitan dengan kategori-kategori lainnya.

Pelatihan ini dilaksanakan di kelurahan Sumur Pacing, Jl. RHM Noeradji Gg. Misna 1 No.Rt. 04 /03, RT.003/RW.002, Sumur Pacing, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten 15114. Waktu pelaksanaan selama 3 kali, pertama pada tanggal 23 April, yang kedua penyuluhan dilakukan pada tanggal 25 April, dan ketiga FGD 14 Mei 2025.

Observasi dan FGD (*Focus Group Discussion*) dilakukan langsung di Kelurahan Sumur Pancing Kota Tangerang, yang merupakan salah satu pusat kegiatan UMKM di Kota Tangerang. Dengan meliputi Lurah Kelurahan Sumur Pancing, Kepala seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Ketua UMKM di Kelurahan Sumur Pancing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, diperoleh adanya ketidaksesuaian antara pernyataan pihak kelurahan dengan kondisi faktual yang disampaikan oleh pelaku UMKM. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara pemerintah sebagai perancang kebijakan dan pelaku UMKM sebagai sasaran program. Persepsi merupakan kunci dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan, karena persepsi mencerminkan bagaimana kebijakan tersebut dipahami, diterima, dan dimanfaatkan oleh sasaran kebijakan (Awaludin & Yusrizal, 2025). Dalam konteks ini, persepsi UMKM terhadap kebijakan daerah merupakan indikator awal efektivitas kebijakan, sehingga kebijakan daerah yang pro-UMKM mampu meningkatkan kinerja usaha signifikan, terutama jika disertai dengan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan (Tyas et al., 2020).

Temuan Pertama Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan kepada Lurah Kecamatan Sumur Pancing Lurah Sumur Pancing menyatakan bahwa mereka

telah menyediakan berbagai bentuk dukungan bagi pelaku UMKM, seperti pelatihan keterampilan (budidaya, barista, konten kreator), bantuan fasilitas, akses permodalan, hingga penyelenggaraan bazar rutin untuk mendukung pemasaran produk lokal. Mereka juga menegaskan telah bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dan membuka ruang kolaborasi melalui berbagai event tingkat kelurahan dan kecamatan. *“Kami telah menyediakan berbagai bentuk dukungan bagi pelaku UMKM, seperti pelatihan keterampilan (budidaya, barista, konten kreator), bantuan fasilitas, akses permodalan, hingga penyelenggaraan bazar rutin untuk mendukung pemasaran produk lokal. Kami juga telah bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dan membuka ruang kolaborasi melalui berbagai event tingkat kelurahan dan kecamatan.”*



Gambar 1. FGD dengan Pihak Pemerintah (Lurah Kecamatan Sumur Pacing)

Temuan kedua Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan bersama Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kelurahan Sumur Pacing memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas dan daya saing para pelaku UMKM di wilayahnya dengan menata struktur UMKM agar menjadi lebih terorganisir dan terstruktur, sehingga koordinasi dan pembinaan dapat berjalan lebih efektif; selain itu, kelurahan juga mendorong pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikat halal dan mengadakan pelatihan digital guna membantu mereka memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pemasaran dan meningkatkan pendapatan, meskipun saat ini banyak pelaku UMKM yang masif sebagai anggota di kelurahan tersebut. *“Saya coba diklat tugasnya salah satunya membenarkan struktur organisasi UMKM ini, rencananya juga saya mau mengurus sertifikasi halal, kalo udah kebentuk dan*

sudah ikut (terorganisir) pengennya nanti edukasi UMKM ini untuk bisa sertifikasi halal, dan (memfasilitasi) pelatihan digital itu bisa salah satu alternatif pendapatan mereka juga”.



Gambar 2. FGD dengan Pihak Pemerintah (Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan)

Temuan ketiga Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan kepada ketua UMKM menyatakan adanya pernyataan terkait dukungan tersebut dinilai belum menyentuh secara merata dan belum optimal. Sebagian besar pelaku usaha mengaku tidak mendapatkan informasi secara langsung mengenai program atau pelatihan yang tersedia. Bahkan, beberapa kegiatan yang dianggap sebagai upaya pemberdayaan UMKM justru dirasakan lebih melibatkan ibu-ibu kader atau pihak tertentu, bukan pelaku usaha yang aktif menjalankan kegiatan ekonomi. Hal ini menimbulkan kesan eksklusivitas dan kurangnya keterlibatan yang adil bagi pelaku UMKM lainnya. *“Mereka (pemerintah kelurahan) sering lemparinya ke kader itu (daripada ke pelaku UMKM, khususnya yang aktif). Orang kelurahan itu, Ibu juga bingung. Pernah sih kita bahas di kecamatan waktu itu. Sebenarnya ininya (programnya) untuk UMKM. Tapi yang (dilibatkan) ini kok kenapa ke kader? Sementara UMKM nggak tahu.”*

Temuan keempat Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap lurah sumur pacing Pernyataan tersebut sejalan dengan Teori Peran Pemerintah, yang dalam konteks pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menekankan perlunya campur tangan pemerintah untuk menjamin terciptanya ekosistem usaha yang kondusif, adil, dan produktif. Selain itu, sejalan juga seperti yang dinyatakan oleh Musgrave dalam (Nizar, 2017), bahwa pemerintah

memiliki tiga fungsi utama dalam perekonomian yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Serta berperan dalam tiga dimensi utama yaitu sebagai fasilitator, regulator dan simulator (Saragih, 2023).

Narasumber Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan berdasarkan Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa, pemerintah Kelurahan Sumur Pacing Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang sedang berupaya mendata ulang dan mengorganisir kembali para pelaku UMKM yang menurut mereka masif dan belum banyak. Menurut pihak Kasi Ekbang, rendahnya partisipasi masyarakat dalam organisasi UMKM masih menjadi hambatan besar dalam upaya pengembangan UMKM yang terstruktur dan berkelanjutan Dalam kaitannya dengan peran pemerintah dalam pengembangan potensi UMKM di Kelurahan Sumur Pacing dengan Teori Pengembangan Ekonomi Lokal. Pemerintah Kelurahan Sumur Pacing, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, menekankan pentingnya partisipasi aktif dari berbagai aktor lokal seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat untuk merancang dan mengimplementasikan strategi pembangunan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Dengan melakukan program pelatihan kewirausahaan, teknologi, dan manajemen usaha dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal contohnya ialah pembinaan bagi pelaku usaha mikro.



Gambar 3. Tahap Penyuluhan Optimalisasi Media Sosial Bagi UMKM

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa UMKM yang tergabung aktif tidak mendapatkan informasi secara langsung mengenai program atau pelatihan yang tersedia. Bahkan, beberapa kegiatan yang dianggap sebagai upaya pemberdayaan UMKM justru dirasakan lebih melibatkan ibu-ibu kader atau pihak tertentu, bukan

pelaku usaha yang aktif menjalankan kegiatan ekonomi. Hal ini menimbulkan kesan kurangnya keterlibatan yang adil bagi pelaku UMKM.

Dalam konteks pembangunan masyarakat berbasis partisipasi, seperti yang digambarkan di atas, keberhasilan program pengembangan UMKM sangat ditentukan oleh cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat sasaran. Teori Komunikasi Pemberdayaan Lokal (*Local Empowerment Communication Theory*) merupakan sebuah kerangka teoritis baru yang dirancang untuk menjawab tantangan komunikasi dalam konteks pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat lokal. Teori ini lahir dari kesadaran bahwa komunikasi yang bersifat top-down atau satu arah sudah tidak lagi cukup untuk mendorong perubahan sosial dan ekonomi secara efektif dan berkelanjutan. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa meskipun program telah dirancang dan dijalankan oleh pemerintah kelurahan, terdapat celah besar dalam proses implementasi dan komunikasi program.

Terdapat lima elemen utama dalam teori ini: inklusivitas komunikasi, dialog interaktif, transparansi informasi, adaptasi media, dan konektivitas sosial. Banyak kebijakan pemerintah gagal menjangkau masyarakat marginal karena komunikasi hanya difokuskan pada kelompok tertentu atau dilakukan secara terbatas. Sehingga, kurangnya transparansi informasi dan komunikasi yang masih bersifat *top-down* di Kelurahan Sumur Pacing yang menyebabkan banyak pelaku UMKM tidak mengetahui keberadaan program pemberdayaan, sehingga tingkat partisipasi menjadi rendah (Tench et al., 2023). Program pemberdayaan pada dasarnya akan berjalan efektif apabila didukung oleh proses komunikasi yang transparan dan aktif. Hal ini sejalan dengan temuan dari (Mulyadi et al., 2023) yang menegaskan bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat sejak tahap perencanaan, partisipasi ini menciptakan rasa memiliki terhadap program dan meningkatkan kemungkinan keberlanjutan inisiatif tersebut.

Secara keseluruhan, Teori Komunikasi Pemberdayaan Lokal menawarkan kerangka konseptual dan aplikatif yang mampu menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pemberdayaan ekonomi. Teori ini menegaskan bahwa komunikasi bukan hanya alat teknis, melainkan strategi transformasi sosial yang dapat mengangkat potensi lokal menuju kemandirian

ekonomi. Dalam era disruptif dan digitalisasi seperti sekarang, penerapan teori ini semakin relevan untuk menciptakan komunikasi publik yang inklusif, berkelanjutan, dan bermakna.

Dalam kaitannya dengan peran pemerintah dalam pengembangan potensi UMKM di Kelurahan Sumur Pacing dengan Teori Komunikasi Pemberdayaan Lokal (*Local Empowerment Communication Theory*) implementasi teori ini dapat menjadi solusi konkret atas permasalahan utama yang ditemukan dalam studi lapangan yaitu kesenjangan informasi, rendahnya partisipasi, dan komunikasi yang tidak merata. Pemerintah kelurahan dapat memulai dengan menyusun strategi komunikasi yang berbasis pemetaan sosial UMKM, menjadikan pelaku UMKM sebagai mitra dialog aktif, serta membuka kanal komunikasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses kapan pun. Langkah-langkah ini akan menciptakan ekosistem komunikasi yang sehat, memperkuat hubungan antar pihak, dan memastikan bahwa pemberdayaan UMKM tidak hanya menjadi kebijakan formal, tetapi menjadi gerakan sosial yang hidup di masyarakat.

Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa meskipun program telah dirancang dan dijalankan oleh pemerintah kelurahan, terdapat celah besar dalam proses implementasi dan komunikasi program. Tidak semua pelaku usaha merasa terlibat atau terfasilitasi, sehingga tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek sosialisasi, mekanisme pendataan, serta partisipasi langsung pelaku usaha dalam perencanaan hingga pelaksanaan program. Pemerintah kelurahan juga perlu lebih aktif dalam melakukan evaluasi dan mendengarkan umpan balik dari pelaku UMKM agar program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan dan berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

SIMPULAN

Pemerintah Kelurahan Sumur Pacing telah merancang dan melaksanakan berbagai program yang bertujuan mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), namun realisasi di lapangan masih belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan para pelaku usaha secara merata. Program-program seperti pelatihan, pendampingan usaha, hingga fasilitasi perizinan sebenarnya telah diinisiasi, namun efektivitasnya belum dirasakan secara konsisten oleh seluruh pelaku UMKM di wilayah tersebut. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan

persepsi antara pihak kelurahan dan pelaku UMKM mengenai sejauh mana program tersebut benar-benar menjangkau, memberdayakan, dan meningkatkan kapasitas mereka. Banyak pelaku UMKM merasa bahwa keterlibatan mereka masih minim, terutama terkait akses informasi, kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan resmi, serta tidak adanya ruang dialog yang cukup terbuka untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan nyata di lapangan.

Minimnya keterlibatan ini menimbulkan persepsi bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah kelurahan masih bersifat terbatas, top-down, dan belum inklusif. Beberapa pelaku UMKM bahkan merasa hanya menjadi objek program tanpa memiliki peran aktif dalam proses perencanaan maupun evaluasi. Kondisi tersebut menandakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme komunikasi, pendataan, dan strategi pelibatan masyarakat yang selama ini diterapkan. Perbaikan pada aspek-aspek tersebut menjadi sangat penting agar kebijakan dan program yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar memiliki dampak nyata terhadap peningkatan daya saing UMKM dan kesejahteraan ekonomi warga.

Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kelurahan Sumur Pacing perlu memperkuat sistem komunikasi dengan pelaku UMKM melalui penyebaran informasi yang lebih merata, transparan, dan mudah diakses. Sosialisasi program sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui media tertulis atau pengumuman pasif, tetapi juga melalui kegiatan tatap muka secara berkala, forum diskusi terbuka, ataupun pemanfaatan platform digital yang lebih terstruktur. Pendekatan ini dapat memastikan bahwa tidak ada pelaku usaha yang tertinggal atau merasa dikesampingkan dalam proses pemberdayaan.

Selain itu, proses pendataan UMKM perlu diperbarui secara rutin untuk memastikan bahwa informasi mengenai kondisi, skala usaha, kebutuhan pembinaan, serta hambatan yang dihadapi pelaku UMKM selalu akurat dan relevan. Data yang mutakhir akan membantu kelurahan menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran dan mengurangi risiko terjadinya ketidaksesuaian antara jenis program dengan kebutuhan riil para pelaku usaha.

Pelibatan UMKM juga perlu diperkuat sejak tahap penyusunan perencanaan hingga implementasi program. Pemerintah kelurahan dapat membuka ruang partisipasi melalui forum konsultasi, kelompok kerja, atau musyawarah tematik

yang memungkinkan pelaku UMKM menyampaikan pandangan, kebutuhan, serta rekomendasi secara langsung. Dengan demikian, program yang dilaksanakan tidak hanya menjadi agenda administratif pemerintah, tetapi juga menjadi hasil kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha.

Lebih jauh, pemerintah kelurahan dapat memperkuat sinergi dengan dinas terkait, lembaga pelatihan, komunitas ekonomi kreatif, dan pihak swasta untuk memperluas akses pelaku UMKM terhadap peluang pembinaan, pemasaran, dan pengembangan jaringan usaha. Kolaborasi lintas lembaga ini penting untuk menghadirkan dukungan yang lebih komprehensif, mulai dari peningkatan kapasitas manajerial, literasi digital, hingga strategi pemasaran berbasis teknologi.

Dengan terbangunnya koordinasi yang responsif, pelibatan masyarakat yang lebih adil, serta pemanfaatan data yang akurat, pemberdayaan UMKM di Kelurahan Sumur Pacing dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya ini pada akhirnya diharapkan mampu mendorong kontribusi UMKM secara lebih signifikan terhadap perekonomian lokal serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan penyertaan-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan penelitian ini, kepada para narasumber atas kesediaan dan keterbukaan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, serta kepada pihak-pihak terkait yang telah membantu kelancaran penelitian. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta atas doa, dukungan, dan motivasi yang senantiasa diberikan hingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, N. S., Nabila, E., Masrifah, U., & Purnama, C. (2025). Analisis Penguasaan Literasi Keuangan , Digital Payment dan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan terhadap Kinerja UMKM di Mojokerto (Literature Review). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Modern Dan Tradisional*, 2(1), 68-75., 2(1), 68-75. <https://doi.org/https://doi.org/10.61166/jiemt.v2i110>
- Artika, S. (2024). *Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD".
- Awaludin, & Yusrizal. (2025). Persepsi Umkm Terhadap Kebijakan Pemerintah

- Daerah Dalam Pengembangan Usaha. *Journal of Applied Economics and Businnes Global*, 1(1), 8-15.
- Bahri, S. (2017). Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11(1), 15-34.
- Budi Dharma, Rukiana Hasibuan, W. (2022). *Analisis Penerapan Pencatatan Laporan Keuangan Pada UMKM (Studi Kasus : Emir Roti)*. 2(3), 700-706.
- Corbin, J. (2020). *Strauss's Grounded Theory* (pp. 25-44). <https://doi.org/10.4324/9781315169170-4>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Hamzah, M., Syukur, M., Salam, M. N., & Junaidi, M. I. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia : Analisis Terhadap Sektor Domestik Dan Stabilitas Inflasi. *Jurnal TRILOGI : Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 2(3), 382-388.
- Hayati, K. R., & Kebonsari, K. (2022). Peran Pemerintah Kelurahan Kebonsari Surabaya Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik*, 4, 11-16. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i1.457>
- HiTangerang.com. (2025). *Peran UMKM dalam Ekonomian Tangerang*. HiTangerang.Com. <https://hitangerang.com/peran-umkm-dalam-ekonomi-tangerang/>
- Karuntu, M. M., Saerang, D. P. E., & Maramis, J. B. (2022). Pendekatan Grounded Teori: Sebuah Kajian Prinsip, Prosedur, Dan Metodologi. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi.*, 10(2), 1070-1081. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41425>
- Khoiri, N. (2018). Metodologi penelitian pendidikan: ragam, model, dan pendekatan. *Semarang: Southeast Asian Publishing*.
- Maria-José Sosa-Díaz, J. V.-B. (2022). Grounded Theory as a Research Methodology in Educational Technology. *International Journal of Qualitative Methods*, 21, 1-13. <https://doi.org/10.1177/16094069221133228>
- Mayantri, S. P. (2024). *Strategi Pengembangan Ummk dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Berbasis Analisis SWOT(Studi Kasus BUMDes Piasa Kulon, Somagede, Banyumas)*.
- Mohajan, D., & Mohajan, H. K. (2023). *Straussian Grounded Theory : An Evolved Variant in Qualitative*. *Paradigm Academic Press Studies in Social Science & Humanities*, 2(2), 33-40. <https://doi.org/10.56397/SSSH.2023.02.06>
- Mujianto, H. (2022). Pemasaran Produk Kopi Guntur Di Desa Dano Melalui Komunikasi Digital. *Jurnal Media Pengabdian Komunikasi*, 1(2), 163-172.
- Mulyadi, T., Wahab, A., Lubis, R., Asir, M., & Hanafiah, H. (2023). Pemberdayaan UMK Lokal Melalui Pelatihan Digital Marketing Dan E-Commerce. *Community Development Journal*, 4(6). https://www.researchgate.net/publication/378871318_PEMBERDAYAAN_UMK_M_LOKAL_MELALUI_PELATIHAN_DIGITAL_MARKETING_DAN_E-COMMERCE
- Nizar, M. A. (2017). *Pillars of Fiscal Policy*. 98516.
- Oktaria, K., Agustina, R., Aliyah, J., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Grounded theory. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(1), 40-49. <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1957>
- Prof. Dr. Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.

- Putri Salsabila Indrawan Lubis, R. S. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 91-110., 2(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.716>
- Raja, F., Kiswandi, P., & Ghifari, M. A. (2023). *Peran Umkm (Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah) Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia*. 1(4), 154-162.
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali* UIN Antasari Banjarmasin. 17(33), 81-95.
- Saragih, M. (2023). *Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Memberdayakan Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Percut Sei Tuan*.
- Sarjana, S., Susandini, A., Azmi, Z., Ratnasari, K., Noviany, H., & Setyowati, L. (2022). *Manajemen UMKM (Konsep dan Strategi di Era Digital)*.
- Tench, R., Meng, J., & Moreno, Á. (2023). *Strategic Communication in a Global Crisis*. Abingdon, Oxon: Routledge.
- Tyas, W. P., Sianturi, O. O., & H, J. K. P. (2020). *Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Rumah (HOME- BASED ENTERPRISES / HBE) DI Kota Semarang, Surabaya*. <https://doi.org/10.14710/jpk.8.1.78-89>
- Wahyunti, S. (2020). Peran Strategis UMKM Dalam Menopang Perekonomian Indonesia Di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Yusa, I. M. M., Riwayati, A., Aminah, S., & Qadar, J. (2024). Pengantar Ilmu Sosial. Accessed: May, 27.